

NOTA DINAS

Nomor 30.a /ND/XIX.PNK/1/2024

Kepada Yth. : Tortama KN VI
Dari : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023
Tempat, Tanggal : Pontianak, 31 Januari 2024

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana terlampir.

Atas perkenan dan perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Wahyu Priyono

NIP 197006011991031002 

Tembusan:
Kaditama Renvaja



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN KINERJA

2023

Independensi
Integritas
Profesionalisme

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (LAKIN). Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2023, dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai satuan kerja BPK yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, laporan ini juga dijadikan sebagai salah satu media penyampaian informasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.

LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 memuat di antaranya kemajuan atas 13 indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dari 13 IKU tersebut, sembilan IKU dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Selain capaian kinerja tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga berhasil memperoleh penghargaan Terbaik III atas LHP DTT Kepatuhan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan penyempurnaan dan pengembangan inovasi di bidang pemeriksaan dan kesekretariatan.

Pencapaian-pencapaian tersebut merupakan komitmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan terus ditingkatkan pada tahun 2023 dalam menyongsong target akhir tahun 2024, yang tertuang dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat sepenuhnya menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, serta dapat dipahami dengan baik dan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun mendatang. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
1. Sekretariat Perwakilan	4
2. Subauditorat Kalimantan Barat I.....	5
3. Subauditorat Kalimantan Barat II	6
D. SUMBER DAYA	6
1. Sumber Daya Manusia	6
2. Anggaran	9
E. ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS	10
B. TARGET KINERJA	11
1. Perjanjian Kinerja	11
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. HASIL EVALUASI AKIP	13
B. CAPAIAN KINERJA	14
1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	19
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	20
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	21
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemenuhan Pemeriksaan Tematik Nasional	23
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	25
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	25
7. Indek Implementasi Nilai Dasar BPK	27
8. Hasil Evaluasi AKIP	28
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	29
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	31

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	32
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	34
13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	35
C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	37
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	37
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	38
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	39
4. Penggunaan Anggaran	39
D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA	40
E. REALISASI ANGGARAN	40
F. INOVASI	41
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Statistik pegawai per 31 Desember 2023	7
Tabel 1.2. Perubahan Anggaran Tahun 2023.....	9
Tabel 2.1. Sasaran Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023	12
Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023	15
Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir	16
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Lima Tahun	18
Tabel 3.4. Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020 - 2024	19
Tabel 3.5. Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020 - 2024	20
Tabel 3.6. Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020 - 2024	21
Tabel 3.7. Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020 - 2024	23
Tabel 3.8. Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020 - 2024	25
Tabel 3.9. Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020 - 2024	26
Tabel 3.10. Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020 - 2024	27
Tabel 3.11. Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 3.12. Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020 - 2024	30
Tabel 3.13. Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020 - 2024	31
Tabel 3.14. Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020 - 2024	33
Tabel 3.15. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 - 2024	34
Tabel 3.16. Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020 - 2024	36
Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja.....	41
Tabel 3.18.1. Indikator Kinerja yang Mencapai dan Belum Mencapai Target	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	3
Gambar 2.1. Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	11
Gambar 3.1. Tren Capaian Evaluasi AKIP Tahun 2020 – 2023	13
Gambar 3.2. Tren Skor Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2023	14
Gambar 3.3. Budaya Kerja #TEGAS	40
Gambar 3.4. Inovasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	42

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Komposisi SDM Menurut Jenis Jabatan	7
Diagram 1.2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan	8
Diagram 1.3. Komposisi SDM Menurut Golongan	8
Diagram 1.4. Komposisi SDM Menurut Status Kepegawaian	8
Diagram 1.5. Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin	8
Diagram 1.6. Komposisi SDM Menurut Masa Kerja di Perwakilan	8
Diagram 3.1. Status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	22

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbarui melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan unsur penyelenggara negara, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun laporan kinerja tidak hanya melekat kepada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kementerian negara/lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan laporan kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai unit kerja pelaksana BPK wajib menyusun laporan kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK. Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPK tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

B. TUGAS DAN FUNGSI

BPK merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam peraturan tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya ialah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI).

Berdasarkan Pasal 606 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

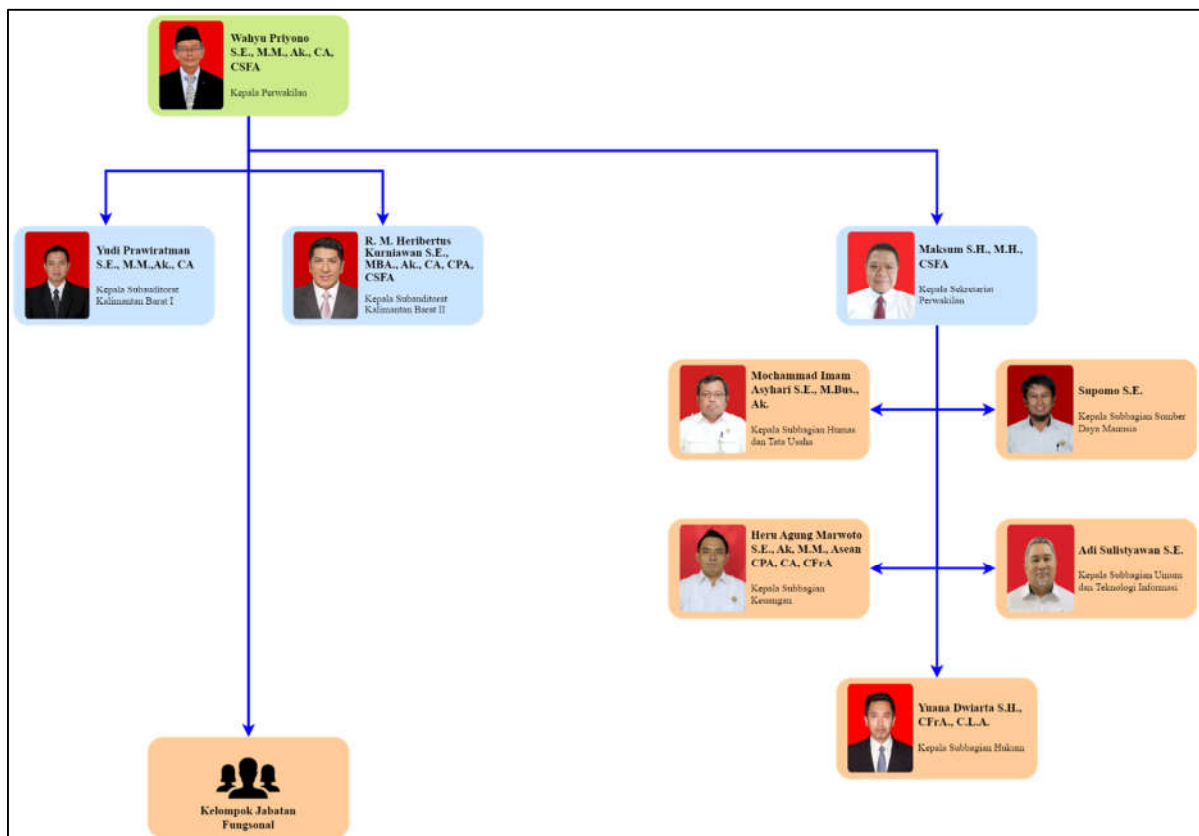
Pasal 607 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 mengurai dua puluh fungsi yang diselenggarakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan melalui Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI nomor 1 Tahun 2019. Sesuai Pasal 605 peraturan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, keuangan, sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Perwakilan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat perwakilan yang membawahkan lima subbagian dengan uraian tugas sebagai berikut.

Sekretariat Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan)

- melaksanakan layanan tata usaha perwakilan;
- melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan;
- mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan;
- pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja;
- penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Melaksanakan Layanan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK.

Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

- melaksanakan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional;
- melaksanakan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai.

Subbagian Keuangan

- menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan;
- menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran; dan
- menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (Umum dan TI)

- melaksanakan layanan administrasi umum;
- melaksanakan pengelolaan arsip dan teknologi informasi; dan
- melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Hukum

- melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

2. Subauditorat Kalimantan Barat I, mempunyai tugas:

Subauditorat Kalimantan Barat I

pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas-entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN untuk:

- merumuskan rencana kegiatan;
- mengusulkan tim pemeriksa;
- melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- menggompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menggompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

3. Subauditorat Kalimantan Barat II, mempunyai tugas:

Subauditorat Kalimantan Barat II

pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- merumuskan rencana kegiatan;
- mengusulkan tim pemeriksa;
- melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

D. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2023 berjumlah 127 pegawai. Tabel dan diagram berikut menyajikan statistik pegawai per periode tersebut.

Tabel 1.1. Statistik pegawai per 31 Desember 2023

STATISTIK PEGAWAI TETAP

1. Menurut Golongan		4. Menurut Jabatan Struktural		8. Menurut Jenjang Pendidikan	
IV/e	: 0	Kepala Perwakilan	: 1	S3	: 0
IV/d	: 1	Kepala Sekretariat Perwakilan	: 1	S2	: 24
IV/c	: 2	Kepala Sub Auditorat	: 2	S1/D4	: 93
IV/b	: 4	Kepala Sub Bagian	: 5	Sarjana Muda/D3	: 9
IV/a	: 3			DI	: 0
	Jumlah		Jumlah Total	SLTA / SMK	: 1
	10		9		Jumlah Total
III/d	: 19	5. Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa			127
III/c	: 7	Pemeriksa Ahli Utama	: 0	9. Menurut Jenis Kelamin	
III/b	: 34	Pemeriksa Ahli Madya	: 4	Laki-laki	: 79
III/a	: 47	Pemeriksa Ahli Muda	: 14	Perempuan	: 48
	Jumlah	Pemeriksa Ahli Pertama	: 78		Jumlah Total
	107		Jumlah		127
II/d	: 2	6. Menurut Jabatan Fungsional Lainnya		10. Menurut Status Pernikahan	
II/c	: 7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	: 0	Menikah	: 77
II/b	: 0	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	: 0	Belum Menikah	: 48
II/a	: 0	Pranata Komputer Ahli Muda	: 1	Duda	: 1
	Jumlah	Arsparis Muda	: 0	Janda	: 1
	9	Pranata Humas Pertama	: 0		Jumlah Total
PPPK		Analisis Kepegawaian Pertama	: 0		127
VII	: 0	Dokter Pertama	: 0	11. Menurut Umur	
VIII	: 0	Perawat Terampil	: 0	>55 Tahun	: 0
IX	: 1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	: 0	51-55 Tahun	: 4
	Jumlah	Pranata Keuangan APBN Mahir	: 0	46-50 Tahun	: 8
	1	Pranata Keuangan APBN Terampil	: 0	41-45 Tahun	: 14
Jumlah Total	127	Pranata Komputer Pertama	: 1	36-40 Tahun	: 12
		Arsparis Pertama	: 1	31-35 Tahun	: 31
		Pranata Komputer Terampil	: 1	26-30 Tahun	: 45
		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	: 0	< 25 Tahun	: 13
			Jumlah		Jumlah Total
			4		127
2. Menurut Status Kepegawaian		7. Menurut Jabatan Pelaksana		12. Menurut Agama	
PNS	: 123	Analisis Protokol	: 1	Islam	: 104
CPNS	: 3	Analisis Humas	: 2	Protestan	: 15
PPPK	: 1	Sekretaris	: 2	Katholik	: 7
	Jumlah Total	Pengelola Layanan Kehumasan	: 0	Budha	: 0
	127	Analisis SDM Aparatur	: 2	Hindu	: 1
		Pengelola Kepegawaian	: 0		Jumlah Total
		Analisis Keuangan	: 2		127
3. Menurut Penempatan		Pengelola Keuangan	: 3	13. Menurut Masa Kerja di Pwk	
Struktural	: 9	Analisis BMN / Pengelola BMN	: 1	> 25 Tahun	: 0
JFP di bawah Kepala Perwakilan	: 0	Pengelola Teknologi Informasi	: 0	21 - 25 Tahun	: 0
Sub Auditorat Kalbar I	: 51	Pranata Kearsipan	: 0	16 - 20 Tahun	: 1
Sub Auditorat Kalbar II	: 45	Pemelihara Sarana dan Prasarana	: 0	11 - 15 Tahun	: 2
JFL dibawah Kepala Sekretariat Perwakilan	: 1	Analisis Hukum	: 0	9 - 10 Tahun	: 2
Sub Bagian SDM	: 3	Pengolah Data Informasi dan Hukum	: 1	7 - 8 Tahun	: 4
Sub Bagian Keuangan	: 6	Pengadministrasi Umum	: 1	5 - 6 Tahun	: 25
Sub Bagian Umum dan TI	: 5	Belum ada SK Japel dan JF	: 3	2 - 4 Tahun	: 34
Sub Bagian Hukum	: 1			<2 Tahun	: 59
Sub Bagian Humas dan TU	: 6				Jumlah Total
	Jumlah Total		Jumlah		127
	127		18		
		Jumlah Total Menurut Jabatan	127		

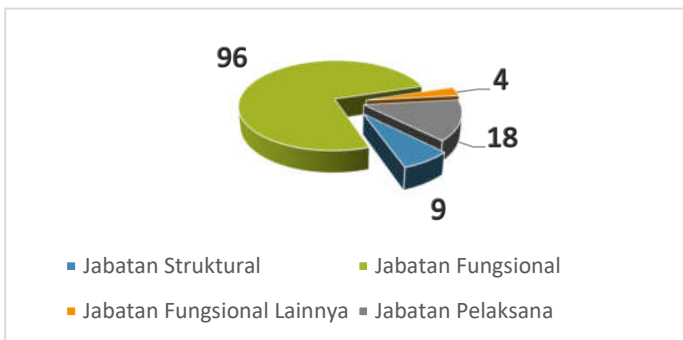


Diagram 1.1. Komposisi SDM Menurut Jenis Jabatan

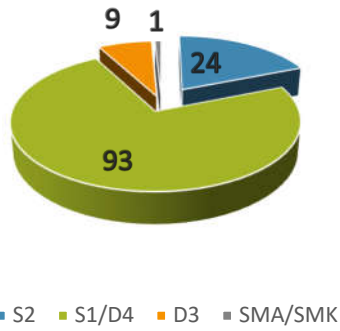


Diagram 1.2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan

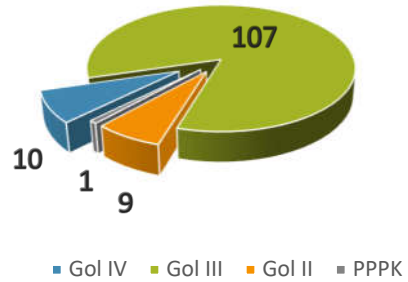


Diagram 1.3. Komposisi SDM Menurut Golongan

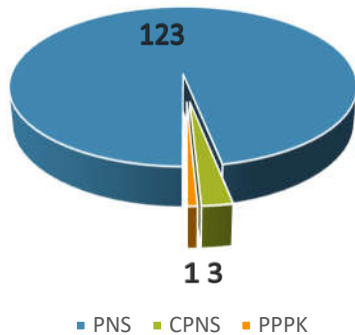


Diagram 1.4. Komposisi SDM Menurut Status

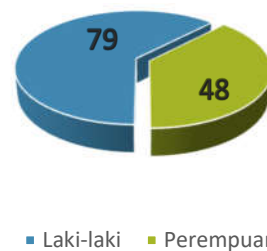


Diagram 1.5. Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin

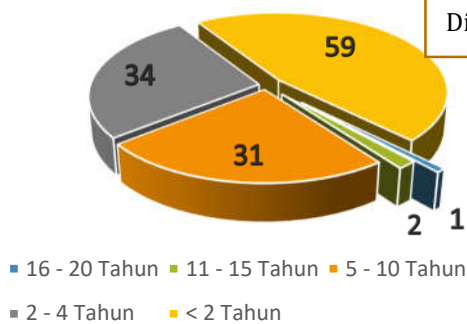


Diagram 1.6. Komposisi SDM Menurut Masa Kerja di Perwakilan

2. Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.660.174.000,0. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp21.568.460.000,00, atau naik sebesar 18,97%. Kenaikan anggaran pada tahun 2023 terdiri dari penambahan anggaran belanja pegawai dan belanja barang, sedangkan belanja modal mengalami penurunan.

Anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan berkaitan dengan penambahan jumlah pegawai dan pengangkatan CPNS menjadi PNS pada tahun 2023. Sedangkan anggaran belanja barang mengalami kenaikan pada anggaran pemeriksaan, khususnya pemeriksaan PDTT dan kinerja pada semester II. Lebih lanjut kenaikan anggaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Perubahan Anggaran Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran 2023	Perubahan Anggaran	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	Rp7.750.958.040	Rp357.688.660	Penambahan jumlah pegawai dan pengangkatan CPNS menjadi PNS
2.	Belanja Barang	Rp17.407.508.430	Rp3.994.936.578	Penambahan objek pemeriksaan PDTT dan Kinerja Semester II
3.	Belanja Modal	Rp416.101.250	(Rp175.364.750)	Penurunan alokasi belanja modal
Total		Rp25.574.567.720	Rp21.397.307.232	

E. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Tahun 2023, meliputi:

1. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal. Diharapkan dengan menggunakan aplikasi SiPTL terdapat peningkatan prosentase penyelesaian yang lebih signifikan;
2. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang berisiko terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat;
3. Belum adanya media komunikasi formil terkait administrasi persuratan dengan pihak entitas pemeriksaan;
4. Inovasi yang telah ada belum sepenuhnya dan langsung memberikan dampak pada pencapaian kinerja.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020 – 2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi BPK. Selain itu, Renstra BPK 2020 – 2024 merupakan pedoman penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan kebijakan seluruh unit kerja di BPK.

Visi, misi, nilai dasar, dan sasaran strategis dalam Renstra BPK 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut.

VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermfaat untuk Mencapai Tujuan Negara"

Berdasarkan visi tersebut, BPK menyusun tiga misi, yaitu:

MISI

- (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

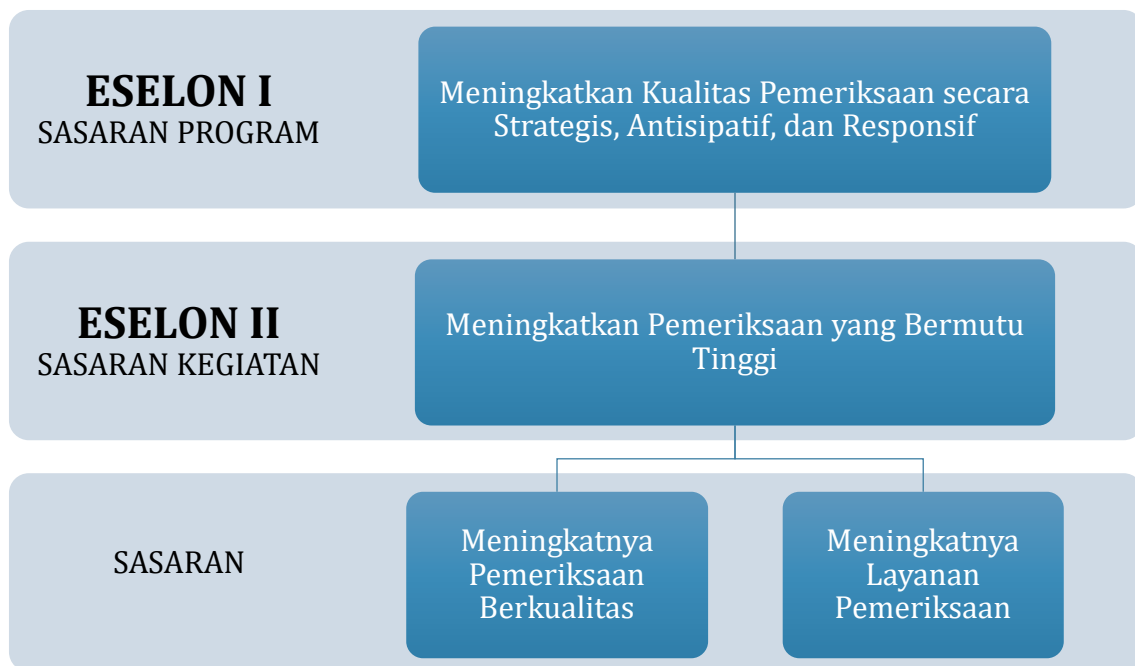
Penyusunan visi dan misi berpijak pada nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh seluruh pegawai BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai dasar tersebut terdiri dari Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

NILAI DASAR

INDEPENDENSI, INTEGRITAS, PROFESIONALISME

Untuk mendukung tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan rancangan aktivitas selama lima tahun dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024 yang telah ditetapkan melalui peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021.

Renstra tersebut merupakan landasan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024, yaitu Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi. Hal ini sejalan dengan pengukuran kinerja melalui aplikasi Prisma setiap tahunnya sebagai bentuk monitoring pencapaian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan kontribusi pencapaian kinerja terhadap unit kerja di atasnya, yaitu Auditorat Utama Keuangan Negara VI.



Gambar 2.1. Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Kegiatan Eselon II, Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi, merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Perwujudannya akan tercermin dari hasil program teknis yang menjadi produk utama BPK, yakni hasil-hasil pemeriksaan yang mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Melalui sasaran kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar, yang diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

B. TARGET KINERJA

1. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya untuk mencapai target mewujudkan kinerja dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024, target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selaku Eselon II dan Tortama KN VI selaku Eselon I dan atasan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Anggota VI BPK, Ketua BPK, dan Wakil Ketua BPK

Sasaran kegiatan, anggaran, indikator kinerja dan target BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2023 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

		Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	Rp22.203.407.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp8.709.849.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp13.493.558.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Seiring dengan penetapan Perjanjian Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyusun rencana aksi pencapaian target-target kinerja tahunan untuk 13 indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Rencana aksi tersebut memuat rincian kegiatan dan langkah-langkah kegiatan setiap triwulan, dan menggambarkan upaya-upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target indikator kinerja. Rincian rencana aksi pencapaian target kinerja tahun 2023 ditampilkan dalam Lampiran 2.

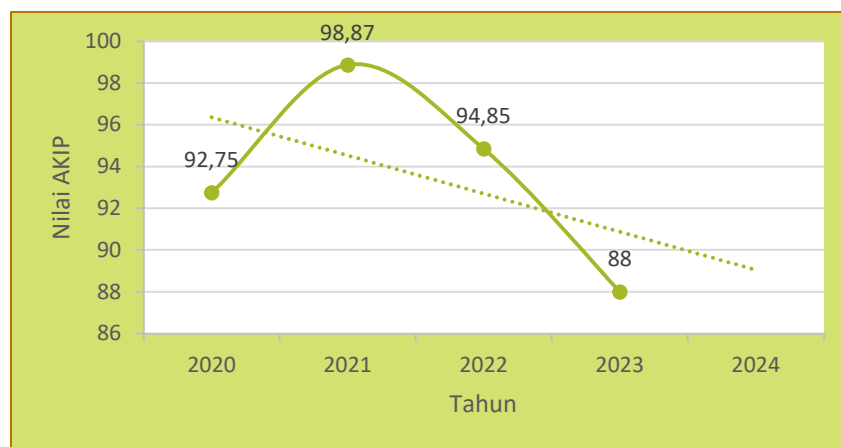
A. HASIL EVALUASI AKIP

Memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, Inspektorat Utama (Itama) BPK RI telah melakukan evaluasi atas Implementasi AKIP pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2023. Tujuan dari evaluasi yang dilakukan Itama adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan yang diperlukan

Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 17/ND/XI/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Penyampaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Satuan Kerja Eselon II di Lingkungan BPK, hasil evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 88 dengan predikat A (Memuaskan). Grafik berikut menyajikan tren nilai evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam periode Renstra 2020 – 2024.



Gambar 3.1. Tren Capaian Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2023

Nilai AKIP Tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian hal ini tidak dapat diperbandingkan karena terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan selain meningkatkan capaian kinerja yakni penyempurnaan *cascading* kinerja hingga ke level individu dan meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN dengan menambahkan informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya (tidak hanya efisiensi keuangan).

Atas hasil evaluasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan koordinasi ke Biro SDM terkait cascading dan Direktorat PSMK untuk penyempurnaan LAKIN.

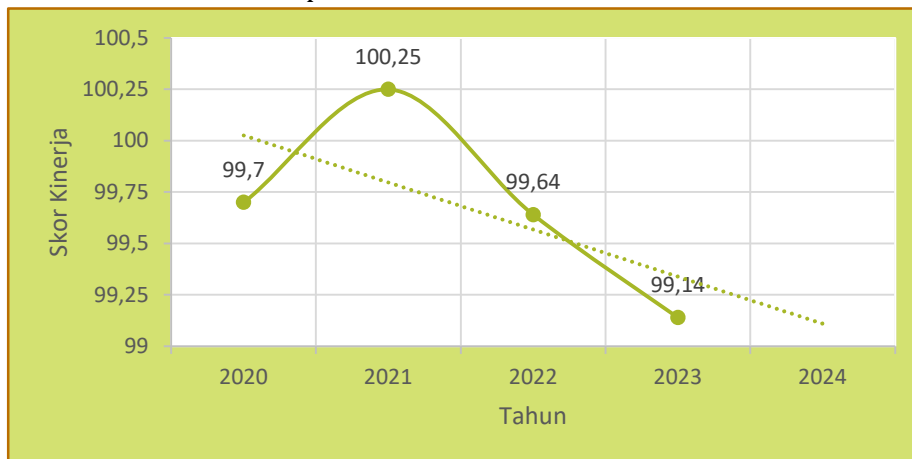
B. CAPAIAN KINERJA

Pengelolaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 diawali dengan penetapan target untuk 13 indikator kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK). Pengukuran dalam rangka pencapaian target dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi PRISMA dengan melampirkan bukti-bukti kegiatan pada portal kolaborasi. Proses monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengukuran dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK).

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Melakukan validasi atas target kinerja Tahun 2023
2. Menyusun rencana aksi Tahun 2023
3. Melakukan monitoring pencapaian kinerja Tahun 2023 setiap triwulan
4. Melakukan inventarisasi permasalahan pencapaian kinerja Tahun 2023
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong pencapaian kinerja

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar 99,14. Skor tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 yang sebesar 99,64. Gambar berikut menyajikan tren skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam periode Renstra 2020 – 2024.



Gambar 3.2. Tren Skor Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2023

Skor capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas 13 indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	80,80%	80,80
	1.1. Hasil QA dan QC Satker (40%)		100,00%	
	1.2. Hasil Evaluasi EPP (60%)		68,00%	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	2.1. Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		17	
	2.2. Jumlah LHP yang diterbitkan		17	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,44%	100,58
	3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		10.149	
	3.2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti		2.977	
	3.3. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		353	
	3.4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		78	
	3.5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		13.557	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,65%	101,65
	4.1. Realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya		9	
	4.2. Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya		9	
	4.3. Alokasi penambahan skor		1,65	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100
	5.1. (REF) Jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait		1	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,09%	100,09
	6.1. Realisasi pemeriksaan tematik lokal		8	
	6.2. Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal		8	
	6.3. Alokasi penambahan skor		0,09	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Memuaskan (4,74)	94,80
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	A (88,00)	98,88
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	99,66%	101,7
	9.1. Tingkat pemanfaatan aplikasi SISDM (20%)		20,00%	
	9.2. Tingkat pemanfaatan aplikasi JASMIN (15%)		14,66%	
	9.3. Tingkat pemanfaatan aplikasi SMP (20%)		20,00%	
	9.4. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP (20%)		20,00%	

	9.5. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL (25%)		25,00%	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan (MP)	100%	103,18%	103,18
	10.1. Tingkat penyusunan Innovative Practice		100,00%	
	10.2. Tingkat Pelaksanaan Aktivitas MP		106,37%	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,91)	102,89
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	99,21%	99,21
	12.1. Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		126	
	12.2. Jumlah seluruh pegawai		127	
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	90,47%	102,22
	13.1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)		85,88%	
	13.2. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)		97,35%	
Skor Kinerja Tahun 2023			99,14	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Terdapat empat IK yang belum mencapai target
 - 1.1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
 - 1.2. IKU 7. Indek Implementasi Nilai Dasar BPK
 - 1.3. IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP
 - 1.4. IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
2. Terdapat IK sama dengan target yang ditetapkan
 - 2.1. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
 - 2.2. IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
3. Terdapat IK melebihi target yang ditetapkan
 - 3.1. IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 - 3.2. IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemenuhan Pemeriksaan Tematik Nasional
 - 3.3. IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 - 3.4. IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - 3.5. IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
 - 3.6. IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentiangan atas Kualitas Komunikasi
 - 3.7. IKU 13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja 4 tahun terakhir (dalam tahun Renstra 2020 – 2024).

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun			
			2023	2022	2021	2020
Skor Kinerja			99,14	99,76	100,25	99,70

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				
		Target Tahun 2023	2023	2022	2021	2020
Meningkatnya Pemeriksaan Bermutu Tinggi	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	80,80%	83,75%	88,67%	81,67%
	IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,44%	79,38%	80,77%	80,51%
	IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,65%	100,91%	100,41%	101,10%
	IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,05%	100,43%	100%
	IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,09%	100,42%	100,28%	100,00%
	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,74)	Sangat Memuaskan (4,69)	Sangat Memuaskan (4,59)	Sangat Memuaskan (4,58)
	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	A (88)	AA (94,85)	AA (95,87)	AA (92,75)
	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	99,66%	94,44%	99,19%	99,19%
	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,18%	110,00%	100,00%	100,00%
	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,91)	Memuaskan (3,69)	Memuaskan (3,91)	Memuaskan (3,81)

IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	99,21%	100%	98,02%	97,17%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88,50%	90,47%	90,10%	91,20%	91,86

Berikut perbandingan realisasi capaian Tahun 2023 dengan target lima tahun.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Lima Tahun

Indikator Kinerja		Target Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	80,80%	80,80%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	75,44%	100,58%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,65%	101,65%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,09%	100,09%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,74	94,80%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA 90,05	A (88,00)	97,22%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	99,66%	99,66%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	103,18%	103,18%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,91	102,89%

IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	99,21%	99,21%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	88%	88,50%	88,70%	90,47%	102,00%

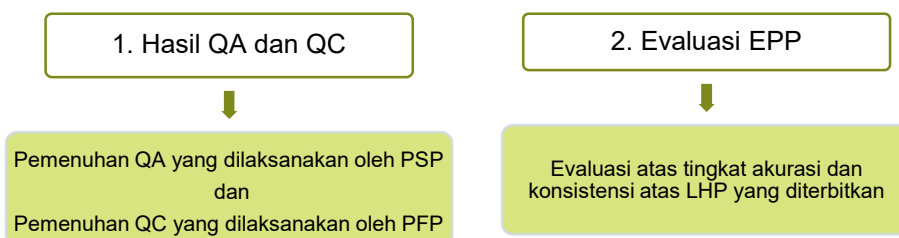
Dari diagram tabel dan uraian diatas, penurunan skor kinerja dikarenakan belum optimalnya capaian atas realisasi indikator. Selain hal tersebut, masih adanya kendala dalam memperbaiki capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang telah maupun melebihi target baik secara individu pegawai maupun organisasi. Namun demikian beberapa upaya-upaya perbaikan juga telah menunjukkan hasil atas indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun sebelumnya.

Berikut uraian capaian masing-masing indikator kinerja periode Tahun 2023.

IKU 1

Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui *quality control* (QC) dan *quality assurance* (QA), serta eksternal satuan kerja melalui evaluasi Direktorat EPP. Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.



Perkembangan capaian IKU 1 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020 - 2024

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	81,67%	88,67%	83,75%	80,80%	#NA
Capaian	81,67	88,67	83,75	80,80	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+7,00	-4,92	-2,95	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	81,67%	88,67%	83,75%	80,80%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan sebesar 80,80% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 80,80. Realisasi tersebut masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Tahun 2023 dengan pengukuran sub IKU sebagai berikut.

1. Sub IKU 1.1 Hasil QA dan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan (bobot 40%) dengan capaian 100%, diperoleh dari pemenuhan QA dan QC atas 32 LHP yang diterbitkan
2. Sub IKU 1.2 Hasil evaluasi EPP (bobot 60%) dengan capaian 68%, dikarenakan belum terpenuhinya aspek akurasi angka pada 2 LHP (86,67%) dan aspek konsistensi pada 9 LHP (40%) dari 15 sampel LHP.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan 96 PFP, 3 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.740.324.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.695.622.352,- atau 99,54%.

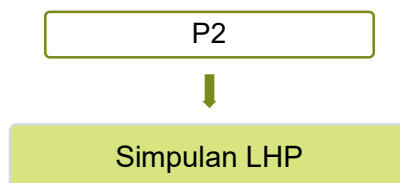
Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini pada tahun 2023 lebih rendah dan menunjukkan tren penurunan. Hal ini dikarenakan masih adanya temuan terkait akurasi dan konsistensi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya mendorong capaian IKU ini dengan meningkatkan aspek akurasi dan konsistensi LHP melalui reuiu silang maupun pelaksanaan verifikasi sebelum diterbitkan.

Realisasi IKU ini baru mencapai 80,80% dari target tahun 2024. Dengan mengupayakan peningkatan kualitas LHP melalui reuiu untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang *zero defect* dan sesuai dengan SPKN dan PMP diharapkan pemenuhan target dapat tercapai di tahun 2024.

IKU 2

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP Kinerja dan DTT dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2), yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas LHP BPK.



Perkembangan capaian IKU 2 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020 - 2024

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	100%	100%	100%	100%	#NA
Capaian	100	100	100	100	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	-	-	-	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan sebesar 100% dari target sebesar 100% atau telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian sebesar 100. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan kesesuaian jumlah LHP yang diterbitkan dengan harapan penugasan.

Pada Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan 8 LHP Kepatuhan dan 9 LHP Kinerja. Pelaksanaan IKU ini melibatkan 96 PFP, 3 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.740.324.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.695.622.352,- atau 99,54%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2023 memiliki tingkat realiasi yang sama dengan tahun sebelumnya. Ketercapaian target IKU ini karena seluruh penugasan pemeriksaan menghasilkan output LHP yang sesuai dengan harapan penugasan dalam P2.

Realisasi IKU ini telah mencapai 100% dari target tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemeriksaan yang telah direncanakan sehingga target yang telah tercapai dapat terus dipertahankan.

IKU 3

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas pemeriksaan (*auditee*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Rekomendasi yang dilakukan pengukuran adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak tahun 2005. Tujuan dari indikator ini untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Perkembangan capaian IKU 3 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6. Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020 - 2024

IKU 3 Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	80,51%	80,77%	79,38%	75,44%	#NA
Capaian	107,35	107,69	105,84	100,58	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+0.34%	-1,85%	-5,26%	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	107,35%	107,69%	105,84%	100,58%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebesar 75,44% dari target sebesar 75%, sehingga capaian sebesar 100,58%. Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi sub IKU berikut.

1. Sub IKU 3.1. jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 10.149
2. Sub IKU 3.2. jumlah rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti atau masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 2.977
3. Sub IKU 3.3. jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 353
4. Sub IKU 3.4 jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 78
5. Sub IKU 3.5. jumlah rekomendasi yang disampaikan ke *auditee* sebanyak 13.557

Pelaksanaan IKU ini melibatkan 96 PFP, 3 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp190.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp190.758.348,- atau 100%.



Diagram 3.1. Status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini pada Tahun 2023 memiliki tingkat realisasi yang lebih rendah. Namun demikian, ketercapaian IKU ini telah melebihi target Tahun 2023. Pencapaian ini berkat komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain hal tersebut, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini aplikasi SiPTL (Sistem Pemantauan Tindak Lanjut) mampu mempercepat entitas pemeriksaan dalam melakukan peremajaan data tindak lanjut secara online di wilayahnya masing-masing. Hal ini juga menunjukkan komitmen dan peran aktif entitas dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Realisasi IKU ini telah melebihi target Tahun 2023. Dengan terus meningkatkan penyelesaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, melakukan evaluasi permasalahan terkait rekomendasi-rekomendasi yang berlarut-larut serta mendorong *auditee* untuk berkomitmen menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan setiap periode, diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan.

Realisasi IKU ini telah mencapai 100,58% dari target tahun 2024. Dengan melakukan upaya-upaya diatas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat memenuhi target sampai Tahun 2024.

IKU 4

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satuan kerja masing-masing dengan satu unit kerja sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's.

Perkembangan capaian IKU 4 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7. Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020 - 2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101,10%	100,41%	100,91%	101,65%	#NA
Capaian	101,10	100,41	100,91	101,65	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	-0,69	0,50	0,74	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	101,10%	100,41%	100,91%	101,65%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar 101,65% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 101,65. Realisasi IKU ini diatas target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut diukur berdasarkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik nasional dan memperhitungkan pembobotan masing-masing peran dalam tim pemeriksaan.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan sembilan pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya, yaitu:

- a. Pemeriksaan signifikan lainnya PN3

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Landak
 2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Melawi
 3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
- b. Pemeriksaan tematik nasional PN2
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Mandatory Spending dan Penerimaan Daerah dalam Rangka Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Pontianak
 5. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Terpadu untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sintang
 6. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Desa Terpadu untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau
 7. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah atas Pengembangan Sektor Unggulan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkayang
 8. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sambas
- c. Pemeriksaan tematik nasional PN4
9. Pemeriksaan Kinerja atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Singkawang

Dalam pelaksanaan seluruh pemeriksaan tersebut, PFP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terlibat sebagai penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim dalam komposisi tim. Pelaksanaan IKU ini melibatkan 96 PFP, 3 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.740.324.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.695.622.352,- atau 99,54%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target Tahun 2023. Hal ini menunjukkan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya yang menjadi program BPK.

Realisasi IKU ini telah mencapai 100,65% dari target tahun 2024. Dengan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang mendukung kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan pimpinan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat memenuhi target sampai Tahun 2024.

IKU 5

Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti lembaga perwakilan dan APH atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan ini dikoordinir oleh AUI dan PKG, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui keterlibatan PFP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Perkembangan capaian IKU 5 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8. Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020 - 2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,43%	100,05%	100%	#NA
Capaian	100	100,43	100,05	100	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+0,43	-0,38	-0,05	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100,43%	100,05%	100%	#NA

Realisasi indikator Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100. Pada Tahun 2023, PFP pada BPK Perwakilan Kalimantan Barat tidak terlibat dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh AUI maupun PKG sehingga mengalami penurunan capaian. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak mengalokasikan anggaran terkait IKU ini.

Realisasi IKU ini sama dengan target yang ditetapkan Tahun 2024. Untuk mengoptimalkan capaian IKU ini hingga Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan serta mendorong PFP untuk mengikuti seleksi pemeriksaan yang dikoordinir oleh AUI dan PKG.

IKU 6

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis RPJMD dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan diluar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

Perkembangan capaian IKU 6 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9. Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020 - 2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,28%	100,42%	100%	#NA
Capaian	100	100,28	100,42	100,09	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+0,28	+0,14	-0,33	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100,28%	100,42%	100,09%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sebesar 100,09% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100,09. Realisasi IKU ini diatas target yang ditetapkan, dan diukur berdasarkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik lokal dengan memperhitungkan pembobotan masing-masing peran dalam tim pemeriksaan.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT BPD Kalimantan Barat dengan komposisi tim seluruhnya merupakan PFP pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Atas pemeriksaan tersebut IKU ini memperoleh penambahan alokasi skor sebesar 0,09%. Pelaksanaan IKU ini melibatkan 6 PFP, 2 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp465.707.000,- dengan realisasi sebesar Rp460.338.516,- atau 98,85%.

Realisasi IKU ini telah melebihi target Tahun 2023. Hal ini menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya melakukan perencanaan pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

Realisasi IKU ini melampaui target yang diharapkan untuk Tahun 2024 yakni sebesar 100,09%. Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan sepenuhnya berupaya merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's.

IKU 7

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Pengukuran indikator ini dilakukan oleh pihak independen dengan skala hasil survei sebagai berikut.

- 🚩 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan
- 🚩 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 🚩 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 🚩 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pegawai BPK atas nilai dasar BPK.

Perkembangan capaian IKU 7 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10. Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020 - 2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5	5	5	5	5
Realisasi	4,58	4,59	4,69	4,74	#NA
Capaian	91,60	91,80	93,80	94,80	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+0,20	+2	+1	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	91,60%	91,80%	93,80%	94,80%	#NA

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2023 sebesar 4,74 (Sangat Memuaskan) dari target sebesar 5, sehingga tingkat capaian realisasi IKU sebesar 93,80. Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai (127 orang) dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.660.174.000,- dengan realisasi sebesar Rp25.594.719.953,- atau 99,74%.

Tabel diatas juga menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun demikian capaian realisasi masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan meskipun pemahaman pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terhadap nilai dasar sangat memuaskan, namun masih menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai dasar belum memadai. Untuk mendorong tingkatan capaian, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus meningkatkan pemahaman pegawai atas nilai-nilai dasar BPK. Pada setiap kesempatan pertemuan dengan pegawai, pimpinan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan selalu mengingatkan para pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjunjung tinggi nilai dasar BPK.

Realisasi IKU ini telah mencapai 94,80% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap IKU ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2024.

IKU 8

Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK dengan predikat penilaian sebagai berikut.

- 🚩 AA = Sangat memuaskan (>90 - 100)
- 🚩 A = Memuaskan (>80 - 90)
- 🚩 BB = Sangat baik (>70 - 80)
- 🚩 B = Baik (>60 - 70)
- 🚩 CC = Cukup (>50 - 60)
- 🚩 C = Kurang (>30 - 50)
- 🚩 D = Sangat kurang (>0 - 30)

Tujuan dilaksanakannya indikator ini untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Perkembangan capaian IKU 8 Tahun 2020 - 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11. Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020 - 2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	AA (90,05)
Realisasi	AA 92,75	AA (95,87)	(AA (94,85)	A (88)	#NA
Capaian	107,85	110,20	107,78	98,88	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+2,35	-2,42	-8,90	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	103%	106,46%	105,33%	97,72%	#NA

Realisasi IKU ini sebesar 88 dengan predikat A (Memuaskan) dari target sebesar 89 dengan predikat A (Memuaskan), sehingga capaian realisasi sebesar 98,88. Capaian tersebut diperoleh dari pembobotan atas empat komponen berikut.

1. perencanaan kinerja (bobot 30%), dengan nilai 27,60
2. pengukuran kinerja (bobot 30%), dengan nilai 17,00
3. pelaporan kinerja (bobot 15%), dengan nilai 12,90
4. evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), dengan nilai 20,50.

Terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian dalam penilaian AKIP Tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun demikian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus megupayakan perbaikan-perbaikan selain meningkatkan capaian kinerja yakni penyempurnaan *cascading* kinerja hingga ke level individu dan meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN dengan menambahkan informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya (tidak hanya efisiensi keuangan).

Realisasi IKU 8 baru mencapai 97,72% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap IKU ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2024.

IKU 9

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan TIK yang disediakan oleh Biro TI secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, SiPTL).

Pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan (*updating*) data masing-masing pegawai pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT dan informasi pegawai.

Pemanfaatan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan *log akses* aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk pejabat struktural sampai level pejabat struktural terkahit dalam satuan kerja.

Pemanfaatan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satuan kerja.

Pemanfaatan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan *log akses* aplikasi SiAP pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa yang masuk dalam surat tugas pemeriksaan, yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, revidi dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.

Pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status bahan tindak lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada satuan kerja.

Tujuan indikator ini untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perkembangan capaian IKU 9 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.12. Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020 - 2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	99,19%	99,19%	94,44%	99,66%	#NA
Capaian	104,41	103,32	97,36	101,7	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	-1,09	-5,96	+4,33	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	99,19%	99,19%	94,44%	99,66%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2023 sebesar 99,66% dari target sebesar 98%, sehingga capaian realisasi sebesar 101,69. Capaian tersebut diperoleh dari pembobotan atas sub IKU berikut.

1. Sub IKU 9.1 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (bobot 20%), dengan capaian 20,00%
2. Sub IKU 9.2 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (bobot 15%), dengan capaian 14,66%
3. Sub IKU 9.3 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (bobot 20%), dengan capaian 20%
4. Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (bobot 20%), dengan capaian 20%
5. Sub IKU 9.5 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (bobot 25%), dengan capaian 25%

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai (127 orang) dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.660.174.000,- dengan realisasi sebesar Rp25.594.719.953,- atau 99,74%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini pada Tahun 2023 mengalami peningkatan, dimana masing-masing sub IKU mampu mencapai bobot yang ditetapkan kecuali pada pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN. Hal ini menunjukkan upaya-upaya perbaikan melalui mentoring maupun pendampingan telah sejalan dengan tujuan dan target indikator ini meskipun belum sepenuhnya

Realisasi IKU ini baru mencapai 99,66% dari target Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian dengan tetap melakukan pendampingan, mentoring maupun sosialisai sehingga pemanfaatan TIK dilakukan secara optimal oleh seluruh pegawai. Dengan demikian IKU ini dapat dipenuhi pada akhir periode Renstra 2020 – 2024.

IKU 10

Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan (MP) dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Tingkat penerapan MP diukur melalui dua sub IKU sebagai berikut.

1. *Innovative Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan/update atas Best Practice yang ada dan dapat direalisasikan melalui

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan BP yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update. Aspek kebaruan yang dimaksud berupa peningkatan metode yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh satuan kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update atas BP yang diimplementasi.

2. Aktivitas manajemen pengetahuan, merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No.60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Tujuan indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Perkembangan capaian IKU 10 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13. Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020 - 2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	110%	103,18%	#NA
Capaian	100	100	110	103,18	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	-	10	-6.82	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100%	100%	110%	103,18%	#NA

Realisasi IKU Tingkat penerapan manajemen pengetahuan sebesar 103,18% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 103.18. Capaian realisasi tersebut diperoleh berdasarkan pembobotan dua komponen sub IKU berikut.

1. Sub IKU 10.1 Tingkat penyusunan/penerapan BP (bobot 50%) dengan skor 100
Pada Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan BP dengan judul “*Dashboard Histoper*”, dan telah disetujui berdasarkan nota dinas Kepala Direktorat PSMK No,48/ND/XII.1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024.
2. Sub IKU 10.2 Tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (bobot 50%) dengan skor 106,37%.

Skor tersebut diperoleh dari delapan kegiatan manajemen pengetahuan yang dapat dikategorikan ke dalam lima jenis aktivitas manajemen pengetahuan dengan rincian sebagai berikut.

- ✚ Diklat sebanyak dua aktivitas
- ✚ Wawancara berbagi pengetahuan sebanyak dua aktivitas
- ✚ Bantuan rekan sejawat sebanyak satu aktivitas
- ✚ KTF Biro SDM sebanyak 2 aktivitas, dan
- ✚ Ekspose sebanyak satu aktivitas.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai (127 orang) dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.660.174.000,- dengan realisasi sebesar Rp25.594.719.953,- atau 99,74%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi atas IKU ini mengalami penurunan namun masih mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kuantitas dari kegiatan aktivitas manajemen pengetahuan yang berkurang sedangkan jenis aktivitas manajemen pengetahuan tetap terpenuhi.

Realisasi IKU ini telah mencapai 103.18% dari target Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk mempertahankan capaian ini dengan melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan secara rutin setiap triwulannya. Dengan upaya tersebut diharapkan IKU ini dapat dipenuhi sampai akhir periode Renstra 2020 – 2024.

IKU 11

Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

Pengukuran indikator ini dilakukan oleh pihak independen dengan skala hasil survei sebagai berikut.

- ✚ 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan
- ✚ 3,00 - 3,99 = memuaskan
- ✚ 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- ✚ 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektifitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan.

Perkembangan capaian IKU 11 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14. Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020 - 2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Realisasi	3,81	3,91	3,69	3,91	#NA
Capaian	100,26	102,89	97,11	102,89	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+2,63	-5,75	+5,78	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	100,26%	102,89%	97,11%	102,89%	#NA

Realisasi IKU Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi Tahun 2023 sebesar 3,91 (Memuaskan) dari target sebesar 3,8 (Memuaskan), sehingga tingkat capaian realisasi IKU sebesar 102,89. Hal ini mengindikasikan persepsi para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada pada rentang memuaskan.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh unit kerja baik pemeriksaan maupun sekretariat dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.660.174.000,- dengan realisasi sebesar Rp25.594.719.953,- atau 99,74%.

Tabel diatas juga menunjukkan adanya peningkatan capaian dari tahun sebelumnya dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dapat diartikan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan selama Tahun 2023 berhasil meningkatkan realisasi capaian. Untuk mempertahankan capaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan kualitas komunikasi dengan

1. Memberikan layanan informasi dan layanan pengaduan masyarakat melalui PIK, baik datang secara langsung maupun secara *online*.
2. Meningkatkan pemahaman tentang BPK
3. Responsif terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
4. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan instansi-instansi vertikal

Realisasi IKU ini telah mencapai 102,89% dari target Tahun 2024. Dengan tetap menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap IKU ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2024.

IKU 12

Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut.

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN)
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU No.5 Tahun 2014)
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa
4. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satuan kerja baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satuan kerja baru. Jika setelah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada pada satuan kerja lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.15. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 - 2024

IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	97,17%	98,02%	100%	99,21%	#NA
Capaian	97,17	98,02	100	99,21	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	+0,85	+1,98	-0,79	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	97,17%	98,02%	100%	99,21%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 sebesar 99,21% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 99,21. Pada Tahun 2023 dari 127 pegawai baru 126 pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan, sehingga masih terdapat 1 pegawai yang belum memenuhi jumlah minimal JP yang dipersyaratkan.

Realisasi IKU ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Subbagian SDM selaku pengampu IKU ini secara aktif dan komunikatif melakukan upaya-upaya berikut.

1. menyampaikan laporan monitoring diklat melalui atasan langsung, mengingatkan, dan mengimbau para pegawai untuk memenuhi JP diklat minimum;

2. melaksanakan diklat *off class* di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk pemeriksa bekerjasama dengan Badan Diklat PKN; dan
3. menginformasikan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN baik *off class*, *online* maupun *self learning* sehingga dapat diikuti oleh seluruh pegawai.

Namun demikian upaya tersebut belum mampu mempertahankan ketercapaian di Tahun 2023. Kendala yang dihadapi yakni terkait monitoring terhadap pegawai mutasi masuk namun belum aktif di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Tingginya volume pemeriksaan mengakibatkan terbatasnya waktu untuk mengikuti Diklat, meskipun telah diarahkan untuk mengikuti diklat secara *self learning*, namun pegawai tersebut belum berhasil menyelesaikan sehingga JP diklat minimum tidak dapat terpenuhi.

Realisasi IKU ini baru mencapai 99,21% dari target Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan capaian dengan tetap melakukan monitoring, memfasilitasi diklat *off class* di kantor perwakilan dan juga mendorong pegawai untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan Badan Diklat PKN. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap IKU ini dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2024.

IKU 13

Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Pengukuran indikator ini melalui pembobotan atas dua sub IKU berikut.

1. EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas aspek implementasi kinerja anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel yakni (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan, (3) pencapaian output, (4) efisiensi.
2. EPA adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan pengukuran indikator uni untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Perkembangan capaian IKU 13 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16. Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020 - 2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50%	88,70%
Realisasi	91,86%	91,20%	90,10%	90,47%	#NA
Capaian	105,59	104,23	102,39	102,22	#NA
Perubahan realisasi (+/-)	-	-1,36	-1,84	-0,16	#NA
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	103,56%	102,82%	101,58%	102,00%	#NA

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran pada Tahun 2023 sebesar 90,47% dari target sebesar 88,50%, sehingga realisasi sebesar 102,22. Realisasi tersebut masih memenuhi target yang telah ditetapkan dan diperoleh berdasarkan pembobotan atas sub IKU berikut.

1. Nilai EKA (bobot 60%), nilai sebesar 85,88% dengan rincian variabel sebagai berikut.
 - ✚ Penyerapan anggaran (bobot 9,7%), nilai sebesar 99,67%
Diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
 - ✚ Capaian output (bobor 43,5%), nilai sebesar 100%
Diukur dengan membandingkan antara realisasi volume rincian output (RO) dengan target volume (RO)
 - ✚ Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan (bobot 18,2%), nilai sebesar 99,85%
Diukur dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
 - ✚ Nilai efisiensi (bobor 28,6%), nilai sebesar 50,83%
Diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran yang seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi program.
2. Nilai EPA (bobot 40%), nilai sebesar 97,35% dengan rincian variabel sebagai berikut.
 - ✚ Revisi DIPA dengan nilai 100
 - ✚ Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 92,02
 - ✚ Penyerapan Anggaran dengan nilai 94,66
 - ✚ Belanja Kontraktual dengan nilai 99
 - ✚ Penyelesaian Tagihan dengan nilai 96,88
 - ✚ Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 96,27
 - ✚ Dispensasi SPM dengan nilai 100
 - ✚ Capaian output dengan nilai 100

Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan, namun masih memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan pembobotan nilai EKA dan EPA diatas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dengan melakukan langkah-langkah berikut.

1. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2023 sebagai evaluasi peningkatan capaian kinerja TA 2024
2. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran dan mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian
3. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala
4. Optimalisasi dan efisiensi atas alokasi pagu anggaran dalam DIPA dan akurasi penarikan dana dengan realisasi pembayaran
5. Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP dan penyampaian LPJ bendahara

Realisasi IKU ini sebesar 102% dari target Tahun 2024 atau telah melebihi target. Diharapkan capaian ini dapat terus dipertahankan hingga Tahun 2024 dengan melakukan upaya-upaya diatas. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan produktif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi mencerminkan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Sejauh ini efisiensi selalu dikaitkan dengan jumlah biaya yang digunakan. Terkait hal tersebut, analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini mengacu pada formula yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam IKU 13. Berikut upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pencapaian target kinerja dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melibatkan seluruh jenjang jabatan SDM yang dimiliki baik terkait tugas-tugas yang bersifat *mandatorial* maupun layanan.

Sebagai contoh PFP pada unit kerja pemeriksaan yang akan melaksanakan tugas pemeriksaan, memerlukan dukungan SDM pada unit kerja sekretariat untuk memfasilitasi administrasi dokumen-dokumen pelaksanaan penugasan, penyiapan pembiayaan, penyediaan sarana, penginputan penugasan maupun dukungan berupa pendapat hukum ketika sudah di lapangan.

Contoh diatas menunjukkan produktivitas berupa keterlibatan semua unit kerja dalam rangka mencapai output pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menempatkan pegawai sesuai jenjang jabatan, kemampuan dan beban kerja, sehingga tahapan penyelesaian kegiatan dapat berjalan dengan efektif.

Memberikan kesempatan seluruh SDM untuk mengikuti diklat maupun melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan seperti yang telah diuraikan dalam IKU 12 dan IKU 10

merupakan salah satu cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat menjadi lebih produktif dan mampu mengisi peran sesuai jenjang jabatan dengan lebih baik.

Pengukuran efisiensi terkait pengelolaan SDM menggunakan keluaran layanan dukungan manajemen internal pada komponen Gaji dan Tunjangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.790.068.000,- dan realiasi sebesar Rp7.771.107.273,- sehingga nilai efisiensi sebesar 50,61%

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerapkan dan memanfaatkan TI untuk mendukung aktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas baik dari sisi waktu maupun biaya.

Berikut upaya efisiensi yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Pemanfaatan portal perwakilan untuk mendukung pengelolaan data.
<https://portal.bpk.go.id/sites/pontianak/Pages/Index.aspx>
Portal perwakilan menyediakan histori data ataupun *link* untuk masuk ke dalam aplikasi penunjang lainnya, sehingga portal merupakan gudang informasi sekaligus sarana komunikasi internal perwakilan. Hal ini mempermudah seluruh pegawai dalam memperoleh data ataupun dokumen yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya (tidak diperlukan biaya pencetakan).
2. Penggunaan jaringan dan server yang disediakan oleh Subbagian Umum dan TI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai database pengelolaan dan penyimpanan data oleh setiap unit kerja. Setiap unit kerja menyimpan *softfile* arsip aktif maupun inaktif pada server perwakilan. Penerapan ruang penyimpanan bersama ini dapat menghemat biaya pemeliharaan PC yang tersedia di masing-masing unit kerja dan juga efektif dari sisi waktu karena dapat diakses dari mana saja.
3. Optimalisasi layanan TIK yang disediakan oleh BPK melalui Biro TI seperti
 - ✚ Penggunaan Jasmin dalam administrasi persuratan dapat menekan biaya pengiriman surat dan lebih cepat dari sisi waktu
 - ✚ penerapan SiPTL dengan entitas pemeriksaan sehingga efektif dari sisi waktu dan juga biaya (jamuan)
 - ✚ Pemanfaatan SMP untuk menginput penugasan pemeriksaan yang langsung terintegrasi dengan SISDM. Otomatisasi aktivitas ini mempercepat aliran kerja dan meminimalisir kesalahan.

Pengukuran efisiensi terkait pemanfaatan TI menggunakan keluaran layanan manajemen internal perwakilan pada sub komponen Mengelola Teknologi Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.764.000,- dan realiasi sebesar Rp68.763.308,- sehingga nilai efisiensi sebesar 50%

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana (BMN)

Efisiensi pengelolaan BMN merujuk pada prinsip meminimalkan biaya dan meningkatkan manfaat untuk memperoleh hasil yang optimal. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya menerapkan pengelolaan BMN dalam batasan-batasan standar kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Berikut upaya efisiensi yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga untuk meningkatkan penerimaan negara.
Efisiensi yang diperoleh berupa PNBPN melalui pendapatan sewa dengan menyewakan rumah negara yang dipergunakan oleh para pejabat dan juga sewa penempatan mesin ATM pada halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemindahtanganan BMN yang sudah tidak dapat dipergunakan dengan baik sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan.
3. Penyimpanan arsip dalam bentuk digital sehingga dapat mengurangi belanja modal untuk sarana penyimpanan.

Pengukuran efisiensi terkait pengelolaan BMN menggunakan keluaran layanan sarana dan prasarana internal pada komponen layanan sarana internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp416.105.000,- dan realiasi sebesar Rp416.101.250,- sehingga nilai efisiensi sebesar 50%

4. Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran sudah dimulai sejak perencanaan, optimalisasi pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Pengukurannya melalui evaluasi tingkat kinerja anggaran yang telah diuraikan pada IKU 13 diatas.

Berikut upaya efisiensi yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Melaksanakan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan
 - ✚ Perencanaan pemeriksaan yang bersifat *mandatory* sesuai dengan jumlah entitas dan SDM yang dimiliki
 - ✚ Alokasi belanja modal sesuai dengan kebutuhan BMN
 - ✚ Alokasi belanja pegawai berdasarkan jumlah SDM
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga dapat dilakukan penajaman kegiatan maupun anggaran untuk optimalisasi pencapaian output
3. Optimalisasi digitalisasi arsip dalam seluruh kegiatan sehingga dapat mengurangi belanja bahan

Nilai efisiensi kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 50,83%, dari pagu sebesar Rp25.660.174.000,- dengan realisasi sebesar Rp25.594.716.953,-.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan budaya kerja pada Tahun 2021, dari semula menggunakan slogan SSSIIP (Senyum, Salam Sapa, Independensi, Integritas, Profesionalisme) menjadi TEGAS (*Trust, Educate, Good Governance, Accountable, Synergy*).



Gambar 3.3. Budaya Kerja #TEGAS

Budaya kerja merupakan cerminan, bentuk penerapan dalam tindakan atas nilai-nilai dasar dan, upaya membangun kebiasaan baik dalam organisasi. Dalam rangka pengimplementasian slogan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kegiatan, seperti penyusunan buku saku budaya kerja, sosialisasi budaya kerja kepada pegawai, pengarahan, dan pengimplementasian budaya kerja oleh pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam layanan-layanan terkait tugas dan fungsi.

E. REALISASI ANGGARAN

Diperlukan dukungan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja.

Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja

Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi	Rincian Output	Realisasi Anggaran	Realisasi Keluaran	Indikator
Rp10.896.730.000,-	Rp10.851.010.678,-	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	Rp155.019.452,-	159	IKU Strategis: 🚩 IKU 1 🚩 IKU 2 🚩 IKU 3 🚩 IKU 4 🚩 IKU 5 🚩 IKU 6
		Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp15.824.160,-	1	
		Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp87.652.497,-	2	
		Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp14.119.200,-	15	
		Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	Rp526.545.475,-	12	
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	Rp190.758.348,-	30	
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	Rp165.469.194,-	30	
		LHP BPK Perwakilan	Rp7.734.813.734,-	32	
		LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan	Rp1.960.808.618,-	20	
		Rp14.763.444.000,-	Rp14.743.706.275,-	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	
Layanan Sarana Internal	Rp416.101.250,-			74	
Layanan Perkantoran	Rp12.386.021.077,-			1	
Rp25.660.174.000,-	Rp25.594.716.953,-				

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh alokasi anggaran digunakan untuk mendukung tercapainya target kinerja. Total realisasi anggaran sebesar Rp25.594.716.953,- dalam rangka mencapai sasaran strategis “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, yang terdiri dari realisasi sasaran “meningkatnya pemeriksaan berkualitas” sebesar Rp10.851.010.678,- dan realisasi sasaran “meningkatnya layanan pemeriksaan” sebesar Rp14.743.706.275,-.

F. INOVASI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2023 telah mengembangkan beberapa inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian kinerja. Inovasi tersebut masih dipergunakan dan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaannya sampai saat ini.



Gambar 3.4. Inovasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

1. Klinik Pengadaan

<https://sites.google.com/view/klinikpengadaanbpk/home?authuser=0&pli=1>

- ✚ Inovasi ini dikembangkan sejak tahun 2021 dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aplikasi-aplikasi terkait pengadaan melalui tutorial maupun konsultasi, serta menciptakan tata kelola dokumen-dokumen pengadaan secara digital sehingga memudahkan pengelolaannya
- ✚ Setelah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, inovasi ini pada tahun 2022 diusulkan sebagai *best practice* dan telah disetujui melalui Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor 707/ND/XII.1/1/2022 tanggal 24 November 2022.
- ✚ Penerima manfaat inovasi ini PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Pejabat Fungsional Pemeriksa
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni seluruh IKU Strategis (IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6) terkait output LHP, IKU 7 berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang harus dipahami PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dan IKU 10 pengakuan sebagai BP.

2. Portal Internal Terpadu-Kuangan (Point-K)

<https://sites.google.com/view/point-k/home>

- ✚ Inovasi ini dikembangkan sejak Maret 2022 dalam rangka tata kelola SPJ perjalanan dinas khususnya pemeriksaan. Inovasi ini memberikan tutorial dan konsultasi penyusunan SPJ sampai dengan pemrosesannya dalam satu dashboard sehingga pelaksana BPK yang melaksanakan perjalanan dinas memahami tata cara pemrosesan SPJ dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban beserta kelengkapannya sesuai ketentuan pembayaran yang disyaratkan. Dampak dari penerapan inovasi ini proses verifikasi menjadi lebih mudah sehingga siklus pencairan anggaran menjadi lebih cepat
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini pegawai pelaksana kegiatan perjalanan dinas pemeriksaan dan verifikatur pada subbagian Keuangan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 13 dan IKU 8 yang berkaitan dengan evaluasi dan implementasi kinerja anggaran.

3. Histori Pemeriksaan (Histoper)

https://lookerstudio.google.com/reporting/0f5e6d07-3d67-4ba1-affb-b6b8ff161e58/page/p_1dh7x9kyvc

- ✚ Inovasi ini dikembangkan sejak Juni 2022, dalam rangka memfasilitasi kebutuhan akan data riwayat pemeriksaan dan keahlian pemeriksa untuk keperluan penyusunan tim pemeriksaan. Sehingga Histoper menyajikan data-data pemeriksa, kompetensi, riwayat pemeriksaan, dan benturan kepentingan.
- ✚ Pada Tahun 2023 Histoper telah disetujui sebagai *best practice* berdasarkan nota dinas Kepala Direktorat PSMK No,48/ND/XII.1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024.
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni pemberi tugas dan pemeriksa
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 7 berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan IKU 10 pengakuan sebagai BP

4. Monitoring Statistik LHKPN (Monistik-LHKPN)

<https://lookerstudio.google.com/reporting/5738d3b4-e0a2-4ec8-b4f3-770be2e2251d/page/WI6vC>

- ✚ Inovasi ini dikembangkan sejak Maret 2022 dalam rangka melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapo LHKPN sehingga dapat mendorong wajib lapo untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Monistik-LHKPN menyediakan data berupa daftar dan infografis, serta memberikan kecepatan dan kemudahan akses informasi.
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni wajib lapo LHKPN dan subbagian SDM
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 7 berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan IKU 9 terkait pemenuhan kewajiban melaporkan verifikasi LHKPN

5. BPK Kalbar Tanggap

- situs web: <https://kalbar.bpk.go.id>;
- permintaan informasi: <https://kalbar-ppid.bpk.go.id>;
- pengaduan: <https://kalbar-ppid.bpk.go.id/>;
- instagram: [@bpkri.kalbar](#); dan
- twitter: [@bpkrikalbar](#).
- ✚ BPK Kalbar Tanggap merupakan media informasi dan komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan masyarakat dan *stakeholder*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan informasi atas kegiatan-kegiatan BPK, kebutuhan atas informasi data yang dimiliki BPK, dan forum komunikasi dengan BPK.
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni masyarakat dan lembaga pengguna informasi
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 7 berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan IKU 11 sebagai sarana komunikasi dengan seluruh stakeholder BPK

6. Pojok SiPTL

- ✚ Pojok SiPTL merupakan penataan ruang yang difungsikan sebagai area publik untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan pemerintah daerah. Hal ini untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengimplementasikan aplikasi SiPTL. Pojok SiPTL terletak di Lantai 1 Gedung Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni pemerintah provinsi/kab/kota di wilayah Kalimantan Barat
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 3 berkaitan dengan prosentase penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK.

7. SAMPAN (Sistem Administrasi Penugasan)

<http://10.125.1.10:8080/login>

- ✚ Inovasi ini baru dikembangkan sejak Februari 2023, dalam rangka menyediakan database penugasan yang lebih efisien dan terintegrasi baik untuk kegiatan pemeriksaan maupun sekretariat. Menyederhanakan proses input, otorisasi dan dan mengeliminasi kelemahan-kelemahan pada Ms.Excel.
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 10 berkaitan dengan aktivitas manajemen pengetahuan.

G. PENGHARGAAN

Selain upaya-upaya dalam rangka pencapaian kinerja, pada Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil memperoleh penghargaan internal BPK. Seleksi atas proses penghargaan dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan meraih urutan terbaik III penilaian kualitas LHP DTT Kepatuhan yang diwakili oleh LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2022 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap Laporan Kinerja ini dapat memberi informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh indikator target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pencapaian skor kinerja Tahun 2023, sebesar 99,14 mengalami penurunan sebesar 0,5 dibanding Tahun 2022 yang mencapai skor kinerja 99,64. Penurunan skor kinerja dikarenakan belum optimalnya capaian atas realisasi indikator. Selain hal tersebut, masih adanya kendala dalam memperbaiki capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang telah maupun melebihi target baik secara individu pegawai maupun organisasi. Namun demikian beberapa upaya-upaya perbaikan juga telah menunjukkan hasil atas indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun sebelumnya.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja maksimal tergambar pada capaian terhadap indikator kinerja untuk 9 indikator yang mencapai target dan 4 indikator yang belum mencapai target, seperti yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Indikator Kinerja yang Mencapai dan Belum Mencapai Target

Indikator Kinerja yang Mencapai Target	Indikator Kinerja yang Belum Mencapai Target
1. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;	1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;	2. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
3. IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;	3. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP;
4. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;	4. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
5. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;	
6. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.	
7. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;	
8. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan	
9. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran.	

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja adalah:

1. Masih terdapat LHP yang belum memenuhi aspek konsistensi dan akurasi;
2. Kurangnya pemahaman pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas implementasi nilai-nilai dasar BPK dan kepatuhan terhadap kode etik

3. Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja tahunan; dan
4. Kurang disiplinnya pegawai dalam memenuhi komitmen pemenuhan jam diklat minimal

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut berupa:

1. peningkatan aspek akurasi melalui reviu silang maupun pelaksanaan verifikasi sebelum LHP diterbitkan.
2. peningkatan pemahaman pegawai atas nilai-nilai dasar BPK. Pada setiap kesempatan pertemuan dengan pegawai, Pimpinan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selalu mengingatkan para pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan menjunjung tinggi nilai dasar BPK;
3. penyempurnaan *cascading* kinerja hingga ke level individu dan meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN dengan menambahkan informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya (tidak hanya efisiensi keuangan).
4. melakukan monitoring, memfasilitasi diklat *off class* di kantor perwakilan dan juga mendorong pegawai untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan Badan Diklat PKN.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan langkah-langkah strategis berupa:

1. optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh pemeriksaan dapat dilaksanakan, baik pemeriksaan yang bersifat mandatory, permintaan *stakeholders*, maupun pemeriksaan tematik nasional dan lokal sesuai arahan pimpinan;
2. internalisasi nilai-nilai dasar BPK dalam setiap kegiatan dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sehingga pegawai senantiasa memegang tinggi IIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. menyempurnakan dan mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat mendorong pencapaian kinerja;
4. menyusun rencana aksi pencapaian kinerja dengan lebih optimal dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.


Laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sekiranya dapat memberikan manfaat dalam melakukan evaluasi dan mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan peran BPK di masa mendatang.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CFrA., ACPA., FCPA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.


ESELON I <small>SASARAN PROGRAM</small>	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
ESELON II <small>SASARAN KEGIATAN</small>	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi
SASARAN	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Meningkatnya Layanan Pemeriksaan</div> </div>

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

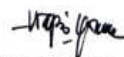
Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,



Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CFrA., ACPA., FCPA.

Pihak Pertama,



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
TAHUN 2023**

**Unit/Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun : 2023**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I	TW II	TW III	TW IV		
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I - Membentuk tim perencanaan dan pengkajian hasil pemeriksaan - Melaksanakan pengarahan dalam rangka pemeriksaan semester I Triwulan II - Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming, diskusi dan koordinasi - Meningkatkan peran KSA selaku PSP untuk melakukan QA yang menjamin pelaksanaan QC berjalan efektif - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 15 entitas Triwulan III - Melaksanakan pengarahan dalam rangka pemeriksaan semester II - Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat EPP atas hasil evaluasi LHP terkait konsistensi dan akurasi Triwulan IV - Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming, diskusi dan koordinasi - Meningkatkan peran KSA selaku PSP untuk melakukan QA yang menjamin pelaksanaan QC berjalan efektif - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci DTT dan Kinerja atas 5 entitas
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan III - Rapat pembahasan dan penyusunan rencana pemeriksaan semester II Tahun 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan							- Koordinasi rencana pemeriksaan semester II Tahun 2023
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I
								- Membentuk Tim Dosir
								Triwulan II
								- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL - Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I dengan mengundang entitas - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).
Triwulan III -								
Triwulan IV								
								- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL - Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester II dengan mengundang entitas - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan III - IV
								- Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional - Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai arahan Badan
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan IV
								- Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
	dari Para Pemangku Kepentingan							<ul style="list-style-type: none"> - Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan - Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai arahan Badan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan III - IV <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal - Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal - Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai arahan badan
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Januari s.d. Desember <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan - Monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. - Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP - Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait budaya kerja
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	-	-	-	A (89,00)	Desember	Januari s.d. Desember <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja
								Maret <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja tahun 2023
								April, Juli, Oktober, Desember <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pencapaian kinerja triwulan sebelumnya
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	20%	40%	60%	98%	Desember	Januari – Desember <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring implementasi aplikasi Jasmin dalam kegiatan kedinasan
								Maret <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring penggunaan aplikasi terkait SISDM dalam rangka peningkatan database pegawai
								Juni dan Desember <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring penggunaan aplikasi SiAP terkait pemeriksaan - Monitoring penggunaan aplikasi SiPTL

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP												
			TW I			TW II			TW III			TW IV																
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)												
																- Monitoring implementasi aplikasi SMP												
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	40%	50%	100%	Desember	Januari - Desember	- Optimalisasi penggunaan portal untuk sharing data dan informasi terkait pemeriksaan maupun kesekretariatan																			
								Februari	- Wawancara berbasis pengetahuan terkait kegiatan-kegiatan pada subbagian SDM - Bantuan rekan sejawat penggunaan aplikasi "SAMPAN" pada subbagian HTUK - Optimalisasi penggunaan portal untuk sharing data dan informasi terkait pemeriksaan maupun kesekretariatan																			
								April	- Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2022																			
								Juni - Desember	- Usulan replikasi/best practice																			
								Juli - Agustus	- Mengikuti KTF yang diselenggarakan Biro SDM - Melaksanakan ekspose terkait pemeriksaan																			
								September	- Reviu pasca aktivitas dan evaluasi atas penggunaan aplikasi "SAMPAN"																			
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan I s.d. IV	- Melaksanakan layanan informasi dan pengaduan sesuai POS dan memberikan kuisioner kepuasan yang diisi pemohon informasi - Menjalani komunikasi dengan entitas terkait informasi/komunikasi sebelum dan setelah pemeriksaan																
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	60%	60%	60%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	80%	90%	100%	Desember	Januari :	- Usulan calon peserta diklat TW I sesuai ND dari Badan/Balai Diklat - Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat											
			Februari :	- pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari																								

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)
												Badan/Balai Diklat.
												Maret : - Usulan calon peserta diklat TW II sesuai ND dari Badan/Balai Diklat - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
												April : - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat - Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW I
												Mei : - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
												Juni : - Usulan calon peserta diklat TW III sesuai ND dari Badan/Balai Diklat - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
												Juli : - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW II
												Agustus : - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
												September : - Usulan calon peserta diklat TW III sesuai ND dari Badan/Balai Diklat - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
												Oktober : - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Menginventarisi kebutuhan angka kredit dan jam diklat - Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW III
												November : - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Badan/Balai Diklat. Desember : - Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Melakukan monitoring dan evaluasi diklat TW IV
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	Desember	<p>Januari s.d. Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran - Monitoring perencanaan anggaran (RPD) tahun 2023 - Menyusun data capaian output - Menyusun laporan bulanan <p>Maret s.d. November</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen perencanaan anggaran tahun 2024 <p>Juni - Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun laporan keuangan tahun 2023

Scorecard Tahun 2023 (<https://prisma.bpk.go.id>)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
PERIODE: DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2023

Perjanjian Kinerja / Peta Strategi **Detail Scorecard** Indikator Kinerja Keluaran (IKK)

Expand Refresh Calculate Export Edit Detail & Dokumen

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
↳ BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Scorecard	Triwulan...				99.14 ●
↳ Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				99.14 ●
↳ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	80,80 %	80.8 ●
↳ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75,00%	75,00%	75,44 %	100.58 ●
↳ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	101,65 %	101.65 ●
↳ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,09 %	100.09 ●
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5,00	5,00	4,74	94.8 ●
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	89,00	89,00	88,00	98.88 ●
↳ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	98,00%	98,00%	99,66 %	101.7 ●
↳ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	103,18 %	103.18 ●
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	3,91	102.89 ●
↳ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	99,21 %	99.21 ●
↳ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	88,50%	88,50%	90,47 %	102.22 ●

BPK-RI
BERWAKILAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARU

#TEGAS

Trust, Educate, Good Governance, Accountable, Synergy



Jl. Ahmad Yani Pontianak



kalbar.bpk.go.id



[@bpkri.kalbar](https://www.instagram.com/bpkri.kalbar)



0561 585349



[@bpkrikalbar](https://www.x.com/bpkrikalbar)